

MATRIKS TPB/SDGS

FORM I. INDIKATOR (PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH)

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN			SUMBER DATA
			2017	2018	2019	
TUJUAN 1 . Tanpa Kemiskinan						
1. 4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	100	100	100	100	dinas pendidikan dan Kebudayaan
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	91,8	91,8	91,82	91,87	dinas pendidikan dan Kebudayaan
TUJUAN 2. Tanpa Kemiskinan						
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	100%	100%	100%	100%	dinas kesehatan, RSUD AU
2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	87,5	87,5	88,4	89,1	Dinas ketahanan pangan, dinas TPH, dinas Perkebunan dan peternakan, dinas perikanan

2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	- Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara meningkatkan produksi dan produktivitas	42%	42%	45%	49%	Dinas PUPR
TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera						
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	105/100000 kelahiran hidup	105	104	104	dinas kesehatan, RSUD AU
3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	1,6/1000 KH	1,6	1,5	1,5	dinas kesehatan, RSUD AU
3.8. Mencapai cakupan kesehatan, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1 Menurunnya <i>unmeet need</i> pelayanan kesehatan					
	3.8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pekon	59	68	75	Dinas Kesehatan
	3.8.3 Ketersediaan obat per kapita	%	90	90	90	Dinas Kesehatan
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	66,64	66,94	67,24	dinas kesehatan, RSUD AU

TUJUAN 4. Pendidikan yang Berkualitas						
1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	111,83	111,83	111,84	111,87	dinas pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	99,31	99,31	99,33	99,53	dinas pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	7,28	7,28	7,30	7,35	dinas pendidikan dan Kebudayaan
4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1. Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	25	25	31	37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TUJUAN 5. Kesenjangan Gender						
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	91.54	91.54	91.60	91.64	dinas PPKBPPPA
		49.16	49.16	50.2	51.2	dinas PPKBPPPA
TUJUAN 7. Energi Bersih dan Terjangkau						
7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang	7.1.1 Meningkatkan rasio elektrifikasi	82,35%	82,35%	86,03%	89,71%	Sekretariat Daerah

terjangkau, andal, dan modern.						
TUJUAN 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi						
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB per kapita	5,01%	5,01%	5,00%-5,20%	5-20%-5,40%	Bappeda, dinas TPH, dinas perikanan, dinas perkebunan dan peternakan
	8.1.1* PDRB per Kapita	19.080.000,00	19.080.000,00	20.917.404,00	22.931.750,01	seluruh OPD (Bappeda)
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	2767567,14	2.767.567,14	2.985.690,05	3.197.846,81	dinas TPH, dinas perikanan, dinas perkebunan dan peternakan
	Tingkat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	-13,65%	-13,65%	2%	4%	dinas koperasi ukm
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	0,96%	0,96%	0,90%	0,85%	dinas PMPTSP naker, Dinas Pora Pariwisata; dinas koperasi ukm;
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	8.9.1. (a) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	16.449	16.449	16.778	17.114	Dinas Pora Pariwisata
	8.9.1. (c) Meningkatnya Devisa sektor pariwisata	325.000,00	325.000,00	500.000,00	600.000,00	Dinas Pora Pariwisata

8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	Jumlah koperasi yang Aktif (Unit)	24	24	26	30	Dinas koperasi ukm
TUJUAN 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur						
9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, keberkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional. (kabupaten)	51,21%	51,21%	55,50%	62,00%	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	245.241,98	245.241,98	247.694,40	250.171,34	dinas koperindag, Sekretariat Daerah
	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	643.153,98	643.153,98	649.585,52	656.081,37	dinas koperindag, Sekretariat Daerah
9.5.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet.	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	Dinas Kominfo
TUJUAN 10. Berkurangnya Kesenjangan						
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi	10.1.1* Koefisien Gini	0,36	0,36	0,34	0,32	Bappeda
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang	14,32%	14,32%	14,00%	13,75%	dinas sosial, dinas koperindag, Bappeda

dari rata-rata nasional.	hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.					
	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	29%	29%	19,84%	9,92%	seluruh opd (dinas PMP)
	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	1.17	1.17	1.16	1.14	dinas PPKBPPPA
TUJUAN 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan						
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	9,06%	9,06%	15,28%	25,93%	Dinas PUPR, Dinas Sosial
	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	90,91%	90,91%	92,30%	93,27%	Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
10.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	30,88%	30,88%	32,35%	33,82%	Dinas Perhubungan

kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.						
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. (desa)	1,47%	1,47%	4,41%	8,82%	BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas PMP
	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam	BPBD, dinas sosial, Satpol PP
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	57,16	57,16	60,35	61,28	Dinas Lingkungan Hidup
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	80%	80%	100%	100%	Dinas PUPR, Bappeda, Satpol PP
TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh						
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. (persentase)	100%	100%	100%	100%	satpol PP, kesbangpol

	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	100%	100%	100%	100%	satpol PP, kesbangpol, Sekretariat Daerah
	16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	100%	100%	100%	100%	dinas PPKBPPPA
	16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	satpol PP, kesbangpol
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh OPD (BPKD)
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	B	B	seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan inspektorat)

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).					
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	-	-	-	C	seluruh OPD (Sekretariat Daerah)
16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	-	-	-	C	Seluruh OPD Pelayanan (Sekretariat Daerah)

MATRIK TPB

FORM II. PROGRAM DAN KEGIATAN (LEMBAGA PEMERINTAH)

PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN			INDIKASI ALOKASI ANGGARAN (Rp Juta)	SUMBER PENDANAA	INSTANSI PELAKSANA	
		2017	2018	2019				
TUJUAN 1 . Tanpa Kemiskinan								
1. 4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat.	%	100	100	100			
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat.	%	91,8	91,82	91,87		dinas pendidikan dan Kebudayaan	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	%	100%	100%	100%	256.983	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Penyelenggaraan Anak Usia (PAUD)	%	100%	100%	100%	6.756	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	%		80%	85%	1.823	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Ketenagaan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara Proporsional	%	80%	85%	85%	3.171	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan	%	85%	85%	85%	1.064	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan

Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan							
Program Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan	Lump		1,00	1,00	265	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase budaya baca dan kunjungan di perpustakaan					1.855	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan perpustakaan	Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan	buku		2.000,00	2.000	300	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pekon Tertinggal menjadi tidak tertinggal	Pekon	38,00	8	8	1.385	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon

TUJUAN 2. Tanpa Kemiskinan

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	100%	100%	100%			
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kasus gizi buruk ditangani	%	100%	100%	100%	350	APBD	dinas kesehatan, RSUD AU

2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

	2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	%	87,5	88,4	89,1			
Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah holtikultura	Produksi Sayuran	ton	58.380	64.390	64.835	465	APBD	Dinas Tanaman Pangan dan HT
	Produksi Buah	ton	14.422	15.215	15.540		APBD	Dinas Tanaman Pangan dan HT
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan	Produksi padi	ton	137.781	138.970	140.620	1.227	APBD	Dinas Tanaman Pangan dan HT
	Kedelai	ton	108	200	222		APBD	Dinas Tanaman Pangan dan HT
Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian	%	0%	20%	20%	13.646	APBD	Dinas Tanaman Pangan dan HT
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terwujudnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	%	30%	33%	36%	1.419	APBD	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya jumlah populasi ternak:5%	%	0%	5%	5%	4.657	APBD	Dinas Perkebunan dan Peternakan

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan	Meningkatnya prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan : 4%	%	51%	20%	20%	13.646	APBD	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan : 1%	%	61%	62%	63%	20.494	APBD	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
	- Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara meningkatkan produksi dan produktivitas	%	42%	45%	49%			
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi baik	%	42%	45%	49%	1.072.408	APBD	Dinas PUPR
TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera								
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
	3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	Jiwa	105	104	104			dinas kesehatan, RSUD AU

Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kasus Bumil KEK dan Balita KEP ditangani		100%	100%	100%	410	APBD	dinas kesehatan, RSUD AU
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang mendapat pelayanan dasar gratis di Puskesmas	Jiwa		17.750	28.000	12.650	APBD	dinas kesehatan, RSUD AU
3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	1,6	1,5	1,5			dinas kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan vaksin serta sarana penunjang IFK	%	90	90	90	8.553	APBD	dinas kesehatan
Perbaikan Gizi Masyarakat.	1. Jumlah kasus bumil KEK yang ditangani. 2. Jumlah kasus Balita KEP yang ditangani.	%	100	100	100	550	APBD	dinas kesehatan
3.8. Mencapai cakupan kesehatan, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
	3.8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pekon	59	68	75			dinas kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.	Persentase pekon yang memiliki outlet untuk pembayaran peserta JKN Mandiri.	Pekon	59	68	75	24.180	APBD	dinas kesehatan
Program Upaya Kesehatan	Jumlah pasien JKN PBI rawat inap dan pasien	Orang	640	1007	1007	717	APBD	RSUD AU

Masyarakat	tanggung negara yang dilayani							
	3. 8.3 Ketersediaan obat per kapita	%	90	90	90			dinas kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin serta sarana penunjang IFK	%	90	90	90	1891	APBD	Dinas Kesehatan
	Alokasi anggaran obat per kapita per tahun.	Rp/Perkapita	12000	12500	12500	0		Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan.	Jumlah kecamatan yang telah dilakukan pengawasan obat dan makanan.	Kec.	5	5	5	421	APBD	dinas kesehatan dan RSUD Alimudin Umar
	Persentase obat yang memenuhi syarat	%	90	90	90	0		dinas kesehatan dan RSUD Alimudin Umar
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	66,64	66,94	67,24			dinas kesehatan dan RSUD Alimudin Umar
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Unit	12	15	15	5.286	APBD	dinas kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan lansia	Unit	15	15	15	475	APBD	dinas kesehatan
Program Pengembangan Kesehatan Tradisional.	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional	Unit	15	15	15	689		dinas kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk	Persentase penduduk miskin yang mendapat pelayanan dasar gratis di Puskesmas.	%	100	100	100	12.650	APBD	dinas kesehatan

Miskin.								
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Jumlah UPT puskesmas terakreditasi madya dan utama	Unit	9	4	2	4.230	APBD	dinas kesehatan

TUJUAN 4. Pendidikan Berkualitas

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.

	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	111,83	111,83	111,84	111,87			dinas pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	99,31	99,31	99,33	99,53			dinas pendidikan dan Kebudayaan
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	7,28	7,28	7,30	7,35			dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	%	100%	100%	100%	256.983	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Penyelenggaraan Anak Usia (PAUD)	%	100%	100%	100%	6.756	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	%		80%	85%	1.823	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Ketenagaan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara Proporsional	%	80%	85%	85%	3.171	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan	%	85%	85%	85%	1.064	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan

Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan							
Program Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	265	APBD	dinas pendidikan dan Kebudayaan
4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
	4.6.1. Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	25	25	31	37			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase budaya baca dan kunjungan di perpustakaan					1.855	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan perpustakaan	Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan	Buku		2.000	2.000	300	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TUJUAN 5. Kesetaraan Gender								
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
	5.1.1* Jumlah kebijakan	%	91.54	91.54	91.60			dinas PPKBPPPA

	yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	%	49.16	49.16	50.2			dinas PPKBPPPA
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	% Perempuan yang terlibat kegiatan ekonomi produktif	%	40%	45%	50%	646	APBD	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Capaian Kebijakan yang berwawasan Gender dan Anak	%	50%	55%	60%	1.721	APBD	
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	% Keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan	%	30%	35%	40%	1.862	APBD	

TUJUAN 7. Energi Bersih dan Terjangkau

7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.

	7.1.1 Meningkatnya rasio elektrifikasi	%	82,35%	86,03%	89,71%			Sekretariat Daerah
Program Pengembangan dan Energi Sumber Daya Mineral	Jumlah peningkatan pembangunan ketenagalistrikan	%	82,35%	86,03%	89,71%	323	APBD	Sekretariat Daerah

TUJUAN 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

	8.1.1 Laju Pertumbuhan PDRB per kapita	%	5,01%	5,00%-5,20%	5-20%-5,40%			Bappeda, dinas TPH, dinas perikanan, dinas perkebunan dan peternakan
	8.1.1* PDRB per Kapita	Rp	19.080.000	20.917.404	22.931.750			seluruh OPD (Bappeda)
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase BUMPekon Berkembang	%	3,82%	7,63%	15,27%			Dinas PMP
	Persentase Pasar Desa Yang Dikelola BUMPekon	%	0,00%	15,00%	19,00%			Dinas PMP
	Jumlah Masyarakat Terlatih Dalam Pengembangan Ekonomi Pekon	%	0%	262	524			Dinas PMP
Program Perencanaan Pembangunan Pertanian	Peersentase data perencanaan dan evaluasi	%	-	0,20	0,20	302	APBD	Dinas TPH
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Jumlah indeks pertanaman per tahun	%	2,19	2,25	2,30	1.902	APBD	Dinas TPH
	Jumlah produksi padi per hektar	Ton/ha	5,14	5,25	5,34	-		Dinas TPH
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah luas panen sayuran	ha	4.132,00	4.135,00	4.139,00	830	APBD	Dinas TPH
	Jumlah luas panen buah-buahan	ha	787,00	795,00	803,00	-		Dinas TPH

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	%	0,00%	20,00%	20,00%	13.163	APBD	Dinas TPH
Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani	Persentase penyuluh pertanian dan lembaga petani yang berkualitas	%	0,00%	20,00%	20,00%	1.595	APBD	Dinas TPH
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Persentase peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	%	0,00%	0,00%	0,00%	18.998	APBD	DISBUNNAK
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkebunan	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pertanian	%	0,00%	0,00%	0,00%	1.245	APBD	DISBUNNAK
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil perkebunan	%	0,00%	70,00%	75,00%	5.235	APBD	DISBUNNAK
Peningkatan Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	Persentase perkembangan sistem perencanaan dan informasi perkebunan yang dinamis dan aktual	%	0,00%	20,00%	40,00%	1.131	APBD	DISBUNNAK
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan jumlah populasi ternak	%	0,00%	5,00%	5,00%	1.206	APBD	DISBUNNAK
Peningkatan	Terwujudnya kelahiran	%	0,00%	20,00%	25,00%		APBD	DISBUNNAK

Penerapan Teknologi Peternakan	ternak hasil Inseminasi Buatan					379		
Pengembangan dan Pelayanan Usaha Peternakan	Persentase pelayanan usaha peternakan	%	0,00%	20,00%	25,00%	231	APBD	DISBUNNAK
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah ternak sehat dari ternak yang sakit	%	0,00%	36,00%	39,00%	1.147	APBD	DISBUNNAK
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	2767567	2.767.567,14	2.985.690,05	3.197.846,81			Dinas TPH, dinas perikanan, dinas perkebunan dan peternakan
	Tingkat pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	%	-13,65%	2%	4%			Dinas koperasi ukm
Pengembangan Sistem Perencanaan Perikanan	Peningkatan sistem perencanaan dan data perikanan yang berkualitas (%)	%	1%	2000%	2000%	710	APBD	Dinas Perikanan
Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap	Persentase luas lahan yang dioptimalisasi	%	10%	5%	7%	12.336	APBD	Dinas Perikanan
	Persentase Sarpras Perikanan yang dikembangkan	%	10%	3%	5%	-		Dinas Perikanan

Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/kapita /tahun	29,10	29,70	30,2	1.404	APBD	Dinas Perikanan
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Kelompok	6,00	2,00	2,00	-		Dinas Perikanan
Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Perikanan	Unit Usaha yang tersertifikasi	Unit	-	30,00	30,00	2.131	APBD	Dinas Perikanan
	Persentase kelompok perikanan yang aktif	%	35%	10%	12%	-		Dinas Perikanan
	Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan (%)	%	20%	10%	12%	-		Dinas Perikanan
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	0,96%	0,90%	0,85%			dinas PMPTSP naker, Dinas Pora Pariwisata; dinas koperasi ukm;
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang memiliki sertifikat kelulusan	%	100,00%	100,00%	100,00%	1.779	APBD	Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang bekerja	%	15,00%	20,00%	25,00%	403	APBD	Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Jumlah lembaga Pelatihan tenaga kerja yang aktif	Lembaga	2	1	1	7.806	APBD	Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan								
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal								
	8.9.1. (a) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara	16.449	16.449	16.778	17.114			Dinas Pora Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase kegiatan promosi pemasaran pariwisata dan ketersediaan kelengkapan informasi kepariwisataan daerah	%	-	100	100	13.936	APBD	Dinas Pora Pariwisata
	8.9.1. (c) Meningkatnya Devisa sektor pariwisata	Rp	325.000,00	500.000,00	600.000,00			Dinas Pora Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% destinasi yang terpelihara	%	-	100	100	10.117	APBD	Dinas Pora Pariwisata
	Jumlah destinasi wisata baru	Lokasi	-	2	2	-		Dinas Pora Pariwisata
8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
	Jumlah koperasi yang Aktif (Unit)	24	24	26	30			Dinas koperasi ukm Perindag
Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi terbina dan terfasilitasi	Unit	58	50	60	979	APBD	Dinas koperasi ukm Perindag
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Jumlah UMKM Layak Pembiayaan	Unit	0	177	186	1165	APBD	Dinas koperasi ukm Perindag

Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
	Jumlah UMKM terdata	Unit	5610	5834	6068	0		Dinas koperasi ukm Perindag
Program Penyaluran Dana Bergulir	Jumlah Mitra BLUD	Mitra	394	40	40	520	APBD	Dinas koperasi ukm Perindag

TUJUAN 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, keberkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

	9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.	%	51,21%	55,50%	62,00%			Dinas PU dan Pera
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	51,21%	55,50%	62,00%	414.993	APBD	Dinas PU dan Pera
Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan terpelihara	%	51,21%	55,50%	62,00%	15.230	APBD	Dinas PU dan Pera
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase tersedianya data ruas jalan dan jembatan	%	100,00%	100,00%	100,00%	440	APBD	Dinas PU dan Pera
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik	%	100,00%	100,00%	100,00%	1.440	APBD	Dinas PU dan Pera
Program Pembangunan saluran	Persentase penanganan air limpasan	%	75,00%	80,00%	85,00%	32.547	APBD	Dinas PU dan Pera

drainase/gorong-gorong/trotoar								
Program pembangunan turap/talud/bro njong	Persentase penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil	%	65,00%	70,00%	75,00%	14.037	APBD	Dinas PU dan Pera
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	32,68%	45,75%	61,44%	111.875	APBD	Dinas PU dan Pera
meningkatkan konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (Persen)	%	30,88%	32,35%	33,82%			Dinas Perhubungan
9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Rp	245.241,98	247.694,40	250.171,34			dinas koperindag, Sekretariat Daerah
	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Rp	643.153,98	649.585,52	656.081,37			dinas koperindag, Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah Pertumbuhan IKM Lampung Barat	%	-2	4	4	3.187	APBD	dinas koperindag, Sekretariat Daerah
Program Percepatan Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Produk IKM yang memiliki standar	Produk	0	70	70	20.363	APBD	dinas koperindag, Sekretariat Daerah
Program peningkatan	Jumlah Wirausaha baru	Kelompok	0	10	10	959	APBD	Dinas sosial

kemampuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam berwirausaha								
9.5.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020								
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet.	%	97,79%	97,79%	97,79%			Dinas Kominfo
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pemberdayaan Aparatur dan Masyarakat yang Paham TIK	%	20,00%	>50%	>75	5.928	APBD	
TUJUAN 10. Berkurangnya Kesenjangan								
10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
	10.1.1* Koefisien Gini	%	0,36	0,34	0,32			Bappeda
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	14,32%	14,00%	13,75%			dinas sosial, dinas koperindag, Bappeda
	10.1.1.(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	%	29%	19,84%	9,92%			seluruh opd (dinas PMP)
	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	%	1.17	1.16	1.14			dinas PPKBPPPA
Program peningkatan kemampuan dan keterampilan	Jumlah Wirausaha baru	Kelompok	0	10	10	959	APBD	Dinas sosial dan Koperindag UKM

masyarakat miskin dalam berwirausaha								
Pemberdayaan Fakir Miskin ,KAT dan PMKS lainnya	Persentase Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibina	%	20	21	21	1.992	APBD	Dinas sosial
Program Penanggulangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	14,32%	14,00%	13,75%			Seluruh OPD
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	% Masyarakat yang berperan serta dalam pembangunan	%	0,68%	0,85%	0,93%	3.314	APBD	Dinas PMP
Program Pengembangan, Penerapan TTG, Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup	% Desa Yang Mempunyai TTG	%	9,16%	11,45%	13,74%	739	APBD	Dinas PMP
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	% BUMDes (BUMPekon) yang menghasilkan PAD	%	3,82%	7,63%	15,27%	1.458	APBD	Dinas PMP

TUJUAN 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

	11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	%	9,06%	15,28%	25,93%			Bappeda ,Dinas PUPR,
--	--	---	-------	--------	--------	--	--	----------------------

	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	%	90,91%	92,30%	93,27%			Dinas PUPR, Dinas Kesehatan
Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	%	0,00%	80,00%	85,00%	629	APBD	Bappeda
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	9,27%	15,49%	20,65%	3.895	APBD	Dinas PU PR
Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	9,27%	15,49%	20,65%	13.146	APBD	Dinas PU PR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase air minum aman	%	73,00%	76,90%	80,80%	28.687	APBD	Dinas PU PR
	Persentase sanitasi layak	%	78,84%	82,34%	85,84%	13.817	APBD	Dinas PU PR
10.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	30,88%	32,35%	33,82%			Dinas Perhubungan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	35,00%	35,00%	40,00%	3.152	APBD	Dinas Perhubungan

Rehabilitasi /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang direhabilitasi	%	30,00%	30,00%	35,00%	295	APBD	Dinas Perhubungan
Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Moda Transportasi yang lulus uji kelayakan	%	51,29%	49,00%	49,00%	6.137	APBD	Dinas Perhubungan
11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
	11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	%	1,47%	4,41%	8,82%			BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas PMP
Kesiapsiagaan	Presentase desa/pekon yang terakses informasi peringatan dini bencana dan pencegahan bencana	%	70	75	77	1.060	APBD	BPBD
Tanggap darurat	Presentase bencana yang ditangani secara optimal	%	90	90	90	1.084	APBD	BPBD
	11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jam	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam			BPBD, dinas sosial, Satpol PP
Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Presentase jumlah ASN/Masyarakat yang memiliki kemampuan penanggulangan bencana	%	85%	100%	100%	1.562	APBD	BPBD
Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah dokumen Pedoman	%	50%	70%	70%	2.529	APBD	BPBD

	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Presentase peralatan PB dalam kondisi prima	%	0%	70%	70%	2.223	APBD	BPBD
11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	%	57,16	60,35	61,28			Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya jumlah kasus Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup	%	0%	16%	30%	2.217	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah	% Cakupan Pengendalian Polusi/Limbah	%	-	1%	27%	1.462	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luas Lahan yang direhabilitasi	%	0%	4%	25%	653	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dikelola	Kec.	7	8	9	12.835	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Keindahan Lingkungan dan Tata Kota	Jumlah Lokasi yang dibangun	%	0%	30%	45%	2.340	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas								
	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	%	80%	100%	100%			Dinas PUPR, Bappeda, Satpol PP
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luas wilayah RTH yang terpelihara	%	0%	18%	36%	14.241	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang	%	30%	65%	100%	982	APBD	Dinas PU PR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang	%	80%	85%	90%	330	APBD	Dinas PU PR
Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	%	0%	80%	85%	629	APBD	Bappeda
TUJUAN 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
	16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	%	100%	100%	100%			satpol PP, kesbangpol

Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Persentase terpeliharanya peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	%	30%	44%	58%	2.350	APBD	satpol PP, kesbangpol
	16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	%	100%	100%	100%			satpol PP, kesbangpol, Sekretariat Daerah
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase terpeliharanya peningkatan kemananan dan kenyamanan lingkungan	%	25%	40%	55%	1.611	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	meningkatnya pemahaman masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Orang	0	90	90	134	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase terlaksananya peningkatan kemitraan wawasan kebangsaan	%	25%	40%	55%	1.050	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
	16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	%	100%	100%	100%			dinas PPKBPPPA
Program Peningkatan	Persentase Peserta yang mengikuti sasialisasi,	%	30%	35%	40%	1.501	APBD	Dinas PPKBPP dan PA

Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pembinaan dan penyuluhan tentang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan							
	16.1.4 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	100%	100%	100%			satpol PP, kesbangpol
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	terlaksananya penertiban dari penyakit masyarakat, miras, perjudian dan praktek prostitusi	bulan	12	12	12	97	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	kali	WTP	WTP	WTP			Seluruh OPD (BPKD)
Program Meningkatkan Akurasi Data dan Aktualitas Data	Persentase akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah	%	100%	100%	100%	2.527	APBD	BPKD
Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta PBB untuk membayar pajak	%	100%	100%	100%	230	APBD	BPKD

serta PBB								
Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase peningkatan PAD	%	3%	3%	3%	1.269	APBD	BPKD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen	97	20	19	2.750	APBD	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang optimal	%	100%	100%	100%	7.076	APBD	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang optimal	%	100%	100%	100%	3.651	APBD	BPKD
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	CC	B	B			seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan inspektorat)

Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti	%	80%	82%	84%	4.239	APBD	seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan inspektorat)
Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	%	0%	80%	85%	1.719	APBD	seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan inspektorat)
Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	%	100%	80%	85%	1.014	APBD	seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan inspektorat)
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Program OPD Terhadap Target Kinerja Pada Renja dan Renstra OPD	%	80%	80%	85%	2.156	APBD	seluruh OPD (Bappeda, Sekretariat Daerah dan inspektorat)
Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	1.059	APBD	Sekretariat Daerah
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	-	-	-	C			seluruh OPD (Sekretariat Daerah)

	Kabupaten/Kota).							
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbina dan meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur		0%	100%	100%	2.427	APBD	seluruh OPD (Sekretariat Daerah)
	16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.	-	-	-	C			Seluruh OPD Pelayanan (Sekretariat Daerah)
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbina dan meningkatnya pengetahuan sumber daya aparatur	%	0%	100%	100%	2.427	APBD	seluruh OPD (Sekretariat Daerah)
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemkab Lampung Barat		-	16%	32%	2.154	APBD	Dinas pendidikan dan Kebudayaan

MATRIKS TPB/SDGS

FORM III PROGRAM DAN KEGIATAN (LEMBAGA NON PEMERINTAH)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN			INDIKASI ALOKASI ANGGARAN (Rp Juta)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	
		2017	2018	2019					
TUJUAN 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera									
3.8. Mencapai cakupan kesehatan, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
	3.8.2 Meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)								
Pemberian Bantuan CSR kepada Penduduk Miskin, Pembayaran Premi BPJS Kesehatan Kelas 3	Terlayannya penduduk miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan	Jiwa	256	596	596	215,01	PT.Liwa Sehat Mandiri	Way Mengaku, Balik Bukit, Kenai, Batuketulis, Sukau, Lombok, Batubrak, Wat Tenong, Fajarbulan, Sumberjaya	RSIA Bunda
TUJUAN 4. Pendidikan yang Berkualitas									
4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
	4.6.1.(a) Meningkatkan rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun.	%	80,00	90,00	100,00				

Program mendukung kegiatan literasi, Kegiatan memberikan bantuan buku-buku	Meningkatnya persentase masyarakat dalam kemampuan literasi	%	100	100	100	20	PT. Liwa Sehat Mandiri	Sumberjaya, Way Mengaku, Fajarbulan, Way Tenong	RSIA Bunda
Program mendukung kegiatan literasi, Kegiatan Literasi Keuangan	Meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan	pertemuan	1	2	0	0	PT.BPR Eka Bumi Artha	Liwa	Bank Eka